

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pertama yang dipilih peneliti adalah jurnal karya Nunung Prajarto dari Universitas Gajah Mada. Penelitian yang berjudul “Praktik Fact-Checking Informasi Pandemi Covid-19 Pada Tempo.co, Tirto.id dan Kompas.com” ini memaparkan praktik pengecekan fakta di tiga media yang telah terverifikasi yaitu Tempo.co, Tirto.id, dan Kompas.com.

Fokus penelitian Nunung Prajarto lebih ke cara kerja praktik pemeriksaan fakta infodemik Covid-19, tepatnya pada tiga bulan awal merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia. Menurut penelitiannya yang diterbitkan di Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 25 No. 1, sepanjang tiga bulan pertama itu, ketiga media tadi memeriksa dan menerbitkan 174 narasi pemeriksaan fakta.

Dalam jurnal penelitian ini juga dijelaskan bahwa ke-174 narasi tersebut berisi informasi tentang pandemi Covid-19 Tempo.co, Tirto.id, dan Kompas.com yang terbit sepanjang bulan Maret-Mei 2020. Peneliti meyakini, pemeriksaan cek fakta tersebut berdasar pada kekhawatiran dan tanggung jawab yang dirasakan ketiga institusi media yang sudah terverifikasi untuk melakukan praktik fact-checking itu. Meski di sisi lain, informasi-informasi tersebut juga membuat masyarakat lebih bisa memahami bahaya virus Covid-19.

Dalam penelitian yang menggunakan analisis konten ini, digambarkan rumit serta kompleksnya proses pengecekan cek fakta tentang berita Covid-19. Infodemik alias persebaran informasi terkait virus, proses disinformasi, dan hoax Covid-19 bergerak amat cepat. Situasi ini kemudian memunculkan disinformasi, misinformasi, serta hoax. Yang kemudian terjadi adalah kemunculan rasa panik di tengah masyarakat, perilaku yang tidak rasional, dan lainnya.

Kadaan ini membuat para jurnalis dan pemeriksa fakta yang menjunjung nilai kebenaran dan keadilan informasi, merasa harus bertindak dengan cara memberikan informasi yang kredibel. Menurut Nunung, secara umum Tempo.co, Tirto.id, dan Kompas.com menggunakan pola praktik jurnalisme pemeriksaan fakta yang sama. Yaitu, di tahap pertama, ketiga media menampilkan klaim misinformasi infodemik untuk memeriksa kebenaran pesan-pesan di platform WhatsApp, video di Facebook, atau artikel di website, kemudian memperlihatkan cara pemeriksaan misinformasi, lalu terakhir mempublikasikannya.

Peneliti juga mengungkapkan, proses pemeriksaan fakta masing-masing media memiliki hubungan dengan kemampuan institusi media. Sebagai akibatnya, masing-masing mempunyai kebijakan tersendiri dalam memilih informasi, menyajikan proses, mempublikasikannya. Untuk verifikasi, misalnya, menurut peneliti, Kompas.com lebih menggunakan metode wawancara atau mencari konfirmasi dari ahli atau pihak terkait. Beda metode verifikasi ini, menurut peneliti, tercermin pula dari kebijakan Tempo.co yang dikenal menerapkan jurnalisme investigasi dengan basis penelitian. Tirto.id, menurut peneliti, memiliki prinsip utama penerapan kode etik jurnalik serta meletakkan sains sebagai metode utama untuk menemukan dan menyajikan fakta. Akan halnya Kompas.com, berteguh pada *value* dan *tagline* “amanat hati nurani rakyat”. Publik atau pembaca diposisikan sebagai pemilik kepentingan utama.

Sebagai kesimpulan, menurut Nunung, selama masa pandemi Covid-19, banyak sekali beredar misinfodemik dalam berbagai bentuk. Semua ini tidak mungkin dilawan oleh media saja melainkan perlu kerjasama dari berbagai pihak. Jurnalisme pemeriksa fakta, menurut Nunung, harus tetap menempati posisi di garda depan pandemic Covid-19 atas nama kepastian serta keadilan informasi.

Peneliti memilih jurnal ini untuk penelitian pendahuluan karena memiliki pokok bahasan yang hampir sama dengan yang akan diteliti. Yaitu tentang cek fakta di media online. Satu hal menarik dari hasil penelitian ini adalah pernyataan dari Nunung tentang adanya keterkaitan masalah penularan Covid-19 dengan pengobatan yang berdasar pada kearifan atau kepercayaan sosial dalam misinformasi. Hal ini tidak dibahas secara khusus dalam penelitian Nunung, sementara topik inilah yang akan dijadikan sebagai salah satu bahasan dalam penelitian ini. (Prajarto, 2021, p.1-14).

Penelitian berikut yang dipilih oleh peneliti bertajuk *Types, Sources, and Claims of COVID-19 Misinformation* ini pada dasarnya disebut lembar fakta. Penulis lembar fakta ini, J. Scott Brennen, Felix M. Simon, Philip N. Howard, dan Rasmus Kleis Nielsen pada dasarnya mempertanyakan, seberapa banyak orang bisa menerima informasi yang dapat diandalkan dari pemerintah sedangkan pemerintahnya sendiri dibayangi oleh persepsi negatif. Hal ini disebabkan oleh begitu derasnya informasi tentang pandemi yang banyak sekali merupakan hoax belaka. Menyikapi situasi tersebut, Brennen dan kawan-kawan berpendapat bahwa pemeriksa fakta independen bisa memberikan analisis otoritatif atas kesalahan informasi tadi. Pada saat yang bersamaan, bisa sekaligus membantu platform media sosial untuk mengidentifikasi konten yang menyesatkan dan bermasalah.

Dari riset RISJ ini, diidentifikasi beberapa jenis misinformasi mengenai pandemi Covid-19 dari jenis serta sumbernya. Tak kurang dari 225 jenis informasi

yang dinilai salah atau menyesatkan oleh pemeriksa cek fakta dalam bahasa Inggris. Riset itu sendiri dilakukan antara bulan Januari-Maret 2020 dengan cara mengambil kumpulan pemeriksaan fakta yang dikelola oleh First Draft News. Metodologi yang digunakan dalam penelitian Brennen dan kawan-kawan ini berupa analisis sistematis dari 225 informasi yang salah tadi. Sementara sampel cek fakta diambil dari kumpulan 2.871 artikel yang diberikan oleh First Draft News, yang menggabungkan cek fakta terkait virus dari basis data *International Fact-Checking Network* (IFCN) Poynter dan alat Google Fact Check Explorer antara Januari dan Maret 2020.

Setelah mengecualikan semua entri non-Inggris, 225 artikel tersebut dianalisa oleh dua pembuat kode berdasarkan skema pengkodean yang telah ditentukan sebelumnya.

Brennen dan kawan-kawan menemukan, dari 225 jenis informasi yang dikumpulkan tersebut, mayoritas sampel atau 88 persen, muncul di platform media sosial. Sisanya tersebar di televisi (9%), di penerbitan media, dan sejumlah penerbitan media, dan situs web. Dari penelitian ini, setidaknya ada lima temuan yang menggambarkan pembohongan serta pesebaran misinformasi tentang pandemi Covid-19. Dalam hal skala, pemeriksa fakta independen menemukan adanya peningkatan signifikan jumlah informasi yang mencapai 900 persen antara bulan Januari-Maret 2020. Karena tidak semua konten informasi yang bermasalah bisa diperiksa serta keterbatasan sumber daya, dipastikan jumlah misinformasi pandemi Covid-19 bisa lebih besar lagi.

Brennen dan kawan-kawan juga menyebutkan, yang juga sering ditemui dalam format informasi palsu dan menyesatkan adalah yang melibatkan gambar atau video yang ditambahkan dengan penjelasan atau narasi yang tidak benar. Ada pula yang memanipulasi gambar dengan penggunaan teknik edit foto atau video

yang sederhana. Misalnya, foto pisang yang diedit menjadi segmen berita untuk menunjukkan buah pisang dapat mencegah atau menyembuhkan Covid-19. Dengan tidak adanya informasi yang memadai, informasi yang salah tentang topik-topik ini akhirnya membuat publik tidak percaya pada pemerintah atau elit politik mereka.

Dalam penelitian ini, Brennen dan kawan-kawan juga menggarisbawahi langkanya sumber daya untuk pengecekan fakta sehingga diperlukan upaya ekstra untuk mengatasi misinformasi dan disinformasi pandemi Covid-19. Para pemeriksa fakta perlu terus meningkatkan koordinasi untuk membatasi tumpang tindih dalam klaim yang mereka nilai dan validasi.

Dari penelitian terdahulu ini, peneliti melihat kesamaan topik yaitu situasi pencetus maraknya hoax di saat pandemi Covid-19. Jika Brennen dan kawan-kawan lebih menyoroti soal kaitannya dengan masalah politik dan para elit politik, maka penelitian ini lebih terfokus pada cara kerja tim fakta kompas.com menangani berita hoax pandemi Covid-19, utamanya yang menyangkut masalah kearifan lokal (Felix, Philip, & Rasmus, 2020, p.1-13).

Yang terakhir adalah penelitian dari Luengo dan Gracia-Marin. Pilihan ini didasari pada kepentingan untuk lebih memahami dan mendalami sejarah kemunculan serta cara kerja pencari fakta. Terutama pencari fakta independen yang jumlahnya semakin banyak begitu pandemi Covid-19 meluas ke seluruh mancanegara. Untuk penelitian ini, Luengo dan Gracia-Marin memanfaatkan riset milik Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ), yang dilakukan pada bulan April 2020 bersama dengan Institut Internet Oxford.

Pada penelitian itu terungkap, jumlah para pemeriksa fakta meningkat secara dramatis antara bulan Januari-Maret 2020. Terutama sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan penyebaran virus Covid-19, Februari 2020

yang disertai dengan infodemik dalam jumlah masif. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *American Journal of Culture Sociology* (2020) berjudul “*The performance of truth: Politicians, Fact-checking Journalism, and The Struggle to Tackle COVID-19 Misinformation*” ini, pemeriksaan fakta atas misinformasi dan disinformasi dilakukan melalui kekuatan interpretatif yang ada dalam jurnalisme dalam melihat kinerja politik Amerika Serikat (AS).

Menurut Luengo dan García-Marín, riset RISJ ini juga menyebutkan, produksi pemeriksaan fakta dalam bahasa Inggris yang dihasilkan media dan pemeriksa fakta independen meningkat lebih dari 900 persen dalam kurun waktu tersebut. Narasi palsu terkait Covid-19 diidentifikasi bersifat dinamis, beradaptasi dengan konteks sosial, dan menjadi semakin dipolitisasi. Sedangkan misinformasi tentang isu-isu ilmiah (terutama yang terkait dengan asal-usul virus) menjadi fokus dari narasi palsu pada awal dimulainya pandemi.

Secara khusus, kedua peneliti ini fokus pada dampak jurnalisme pengecekan fakta atas dugaan klaim palsu dari politisi dan otoritas publik di masa puncak pandemi.

Untuk memastikan bagaimana pemeriksa fakta bekerja dalam proses politik *de-fusion* dan penggabungan ulang (*re-fusion*), pelacakan dilakukan atas narasi pengecekan fakta seputar misinformasi Covid-19 menggunakan berbagai kumpulan yang tersedia, khususnya database milik lembaga seperti IFCN (*International Fact-Checking Network*). Penelusuran ini menghasilkan dua jenis klaim misinformasi yang dievaluasi oleh pemeriksa fakta. Pertama, klaim palsu dari bawah-ke-atas (*bottom-up*) tentang tanggapan pemerintah terhadap pandemi dan kedua, misinformasi atas-ke-bawah (*top-down*) yang berasal dari otoritas publik seperti politisi terkemuka, pemerintah, dan lainnya.

Di Amerika Serikat, gerakan melakukan pengecekan fakta ini tergabung dalam berbagai institusi berita yang berbeda dan secara rutin melakukan pertemuan tahunan untuk membahas cara menghadapi semakin maraknya berita-berita salah dan palsu. Antara tahun 2011-2015, berbagai konferensi nasional dan internasional dilaksanakan berturut-turut. Di situ, para wartawan dan pakar jurnalistik membahas masalah berita palsu dan masa depan pengecekan fakta yang cakupannya semakin global. Mereka ini bergabung dalam *International Fact-Checking Network* (IFCN).

Penelitian Luengo, M dan García-Marín dipilih peneliti karena menggambarkan hiruk-pikuknya situasi jurnalistik akibat terjadinya pandemic Covid-19. Hal yang sama terjadi di Indonesia, di mana kemunculan berita disinformasi, misinformasi, dan malinformasi luar biasa banyaknya dan nyaris tidak terbendung. Di sinilah peran pengecek fakta sangat diperlukan sementara jumlahnya masih sedikit. Persamaan kondisi ini membuat peneliti ingin mengetahui lebih jauh, bagaimana cara mereka mengatasi hal tersebut dan apakah hal sama terjadi di Indonesia. Peneliti juga meyakini penelitian tersebut bisa memperkaya bahasan dalam penelitian ini. (Luengo & García-Marín, 2020, p.405-427).

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Komunikasi Massa

Komunikasi massa merupakan salah bentuk dari kegiatan komunikasi, menyampaikan pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Dari terminology istilahnya yaitu komunikasi massa, pengertiannya dapat dikatakan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator (pengirim) kepada komunikan (penerima) dengan menggunakan media massa sebagai perantaranya. Selain penggunaan media massa sebagai perantara dalam mengirimkan pesan, pihak komunikan dalam komunikasi massa ini melibatkan banyak orang. Dengan kata lain pesan dalam komunikasi massa ini diperuntukkan kepada massa.

Mengenai penggunaan media massa sebagai saluran dalam komunikasi massa, Gerbner yang dikutip Ardianto (2009) menyatakan: “*Mass Communication Is The Tehnologically and Institutionally Based Production and Distribution of The Most Broadly Shared Continuos Flow of Messages In Industrial Societies*”.

Dari definisi Gerbner tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Bentuk dari penyampaian pesan berteknologi dan terlembaga hari ini adalah media massa cetak dan media massa online, yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.

2.2.2 Fungsi Komunikasi Massa

Terdapat beberapa fungsi dari komunikasi massa ini, menurut Dominick sebagaimana dikutip Ardianto (2009) dalam bukunya Komunikasi Massa menjelaskan fungsi komunikasi massa:

1. Fungsi *surveillance* (pengawasan), komunikasi massa dalam hal ini tidak lepas dari peranan media massa sebagai watch dog atau anjing pengawas dalam tatanan sosial masyarakat, media massa bisa disebut sebagai alat kontrol sosial.
2. Fungsi *interpretation* (penafsiran), komunikasi massa memberi fungsi bahwa media massa sebagai salurannya sedang memasok pesan

atau data, fakta, dan informasi dengan tujuan memberi pengetahuan dan pendidikan bagi khalayak.

3. Fungsi *linkage* (keterkaitan), komunikasi massa dalam fungsi keterkaitannya ialah saluran media massa bisa digunakan sebagai alat pemersatu khalayak atau masyarakat yang notabene tidak sama antara satu dengan yang lain.

4. Fungsi *transmission of value* (penyebaran nilai), komunikasi massa sebagai fungsi menyebarkan nilai mengacu pada bagaimana individu atau khalayak dapat mengadopsi sebuah perilaku dan nilai kelompok lain. Itu terjadi karena media massa sebagai salurannya telah menyajikan pesan atau nilai-nilai yang berbeda kepada masyarakat yang berbeda pula.

5. Fungsi *entertainment* (hiburan), dalam fungsi komunikasi massa sebagai sarana penghibur, media massa sebagai saluran komunikasi massa dapat mengangkat pesan-pesan

yang sifatnya mampu menciptakan rasa senang bagi khalayak. Kondisi ini sebetulnya menjadi nilai lebih komunikasi massa yang pasti selalu saja menghibur, sekalipun isi pesan tidak murni menghibur.

Kelima fungsi tersebut jika disederhanakan mengarah kepada upaya untuk kontrol terhadap sosial, fungsi tersebut juga berimplikasi terhadap media massa sebagai saluran dari komunikasi massa hingga akhirnya media massa memiliki fungsisebagai kontrol sosial. Melihat kepada dampak dari media massa terhadap publik yang mampu mempengaruhi perasaan, emosi, psikologi dan tindakan masyarakat secara

2.2.3 Peran Media Jurnalistik

Dari terminologi atau sudut pandang bahasanya, secara etimologi jurnalistik berasal dari kata *journ* atau *jurnal* yang dalam bahasa Perancis berarti catatan atau laporan harian. Definisi menurut MacDougall (Kusumaningrat, 2012, p.15-16). Jurnalisme/jurnalistik adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa.

2.2.4 Media Online

Media online secara sederhana adalah media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Dari penggunaannya yang melibatkan perangkat internet tersebut, saat ini di Indonesia media online menjadi media massa elektronik yang sangat populer dan banyak digunakan oleh masyarakat (Suryawati, 2010, p.46).

2.2.5 Disinformasi, Misinformasi dan Malinformasi

Besar Bahasa Indonesia, Disinformasi didefinisikan sebagai:

Penyampaian informasi yang salah (dengan sengaja) untuk membingungkan orang lain.

Pengertian lain adalah seperti yang dituangkan dalam buku *Journalism, Fake News and Disinformation* (2018) yang diterbitkan UNESCO. Dalam publikasi ini, UNESCO membagi kabar bohong alias hoaks dalam tiga kategori, yaitu:

1. Misinformasi adalah informasi yang memang tidak benar atau tidak akurat tetapi pihak yang menyebarkannya berkeyakinan bahwa informasi tersebut akurat dan dapat dipercaya. Pada dasarnya si penyebar tidak memiliki itikad buruk selain ingin mengingatkan orang lain agar waspada atau berjaga-jaga.
2. Disinformasi adalah informasi tidak benar, sengaja dibuat atau direayasa sedemikian rupa oleh mereka yang berniat membohongi masyarakat. Tujuannya, ingin mempengaruhi opini publik dan memperoleh keuntungan tertentu dari situ.
3. Malinformasi adalah informasi yang punya cukup unsur kebenaran, baik berdasarkan penggalan atau keseluruhan fakta obyektif akan tetapi ketika disajikan dikemas sedemikian rupa. Tujuannya tidak lain adalah merugikan pihak lain atau kondisi tertentu, alih-alkih bertujuan demi kepentingan publik. Yang termasuk dalam bentuk malinformasi antara lain, ujaran kebencian, pelecehan verbal, menyebarkan informasi hasil pelanggaran privasi dan data pribadi, serta diskriminasi.

Penjelasan lain tentang Misinformasi dan Disinformasi adalah yang disampaikan Fox dalam (Floridi, 2011, p.34). Bahwa sekeping informasi bisa disebut benar jika mempresentasikan dunia seperti apa adanya dan menjadi salah

jika menggambarkan kejadian berbeda dari realitas sesungguhnya. Sedangkan Bryan Skyrms dalam (Floridi, 2011, p.336). Berpendapat bahwa misinformasi adalah salah satu bentuk informasi menyesatkan. Fokus Skyrms adalah pada sifat atau karakteristik misinformasi yang paling mengganggu karena pada prinsipnya informasi yang tidak akurat tak akan memunculkan masalah besar jika bisa dideteksi berisi nilai informasi yang salah.

Akan halnya disinformasi, Piper dalam (Floridi, 2011, *ibid*). Mendefinisikan sebagai jenis tertentu dari misinformasi yang dengan sengaja dibuat untuk kemudian disebarluaskan secara aktif dan bertujuan menyesatkan. Pembuatan informasi ini memang dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian, kekacauan lewat cara merusak kepercayaan terhadap sebuah isu tertentu.

2.2.6 Cek Fakta

Bernaung di bawah Poynter Institute, *The International Fact-checking Network* (IFCN) didirikan untuk menyatukan serta mengawasi para pengecek fakta di seluruh dunia (Poynter 2018). Sebagai badan pengawas, IFCN membuat sejumlah komitmen yang sekaligus berfungsi sebagai panduan untuk para jurnalis saat melakukan kegiatannya jurnalistiknya. (Smalley & Bealor, 2015).

Ada empat poin utama dalam panduan itu: komitmen untuk tidak terlibat pada kubu tertentu dan bersikap adil (*nonpartisan and fairness*), komitmen mencantumkan sumber yang transparan (*transparency of sources*), komitmen bersikap terbuka pada masalah, terbuka dalam hal pendanaan yang menaungi perusahaan media. menyembunyikan metodologi yang digunakan saat melakukan cek fakta. (Poynter, 2022).

Meski bersifat terbuka pada setiap media atau organisasi untuk terlibat di dalamnya, IFCN menerapkan sejumlah syarat. Di antaranya, organisasi yang

terlibat di dalamnya harus mengunggah laporan secara teratur dan tidak memihak terkait pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat atau tokoh publik. (Poynter, 2019).

Berkaitan dengan aspek bersikap adil serta tidak berpihak, IFCN memastikan bahwa semua organisasi atau media yang di bawah naungannya menerapkan cara yang sama dalam melakukan pemeriksaan pada setiap informasi yang akan ditelisik serta bersikap netral. Selain itu, Para pemeriksa fakta pun dipastikan hanya melakukan fact-checking murni berdasar data yang ada tanpa campur tangan atau masukan pihak tertentu.

Untuk masalah transparansi sumber daya (informasi), IFCN memastikan bahwa organisasi atau media yang menjadi anggotanya menyediakan sumber yang terbuka dan terperinci dari setiap konten yang diunggah, kecuali informasi yang bersifat personal dan rahasia.

Selain itu, media dan organisasi yang menjadi anggota IFCN diwajibkan bersikap transparan terkait masalah aliran dana. IFCN akan memastikan bahwa pihak pemodal atau yang mendanai organisasi/media tersebut, tidak mempunyai kekuasaan yang bisa mempengaruhi hasil akhir pengecekan fakta yang dilakukan. Organisasi atau media yang menjadi anggotanya diwajibkan menyerahkan dokumen kepemilikan, biografi seluruh pihak yang terlibat di dalam organisasi atau media. Hal ini bertujuan agar pembaca bisa dengan mudah mengontak organisasi atau media tersebut. (*The Commitments of the Code of Principles*. Poynter).

Persyaratan lainnya, pihak IFCN harus memastikan bahwa terdapat transparansi metodologi fact-checking pada media tersebut. Pembaca pun harus diberi penjelasan, mengapa dan bagaimana pemeriksaan tersebut dilakukan oleh organisasi atau media yang bersangkutan. Yang terakhir, adanya keselarasan

antara proses koreksi yang dilakukan dengan aturan yang dikeluarkan oleh organisasi fact-checking atau media sehingga pembaca dapat dipastikan menerima konten yang tepat. (Poynter, 2019).

IFCN dipilih untuk konsep penelitian ini karena mempunyai aturan serta panduan yang jelas dan ketat untuk pemeriksaan fakta.

Kendati IFCN adalah organisasi yang fokusnya lebih pada fact-checking konten politik (Kruger, 2017, p.267). IFCN juga menegaskan bahwa salah satu syarat bagi sebuah organisasi atau media yang melakukan fact-checking adalah yang juga melakukan deteksi pada konten viral yang keliru dan yang tersebar melalui media sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan karena berhubungan dengan pemahaman dan praktik cek fakta yang dilakukan di Kompas.com.

2.2.7 Kearifan Lokal

Kearifan lokal, menurut Edi Sedyawati, merupakan keaneragaman pola perilaku yang terwujud dari hasil budaya. Jika merujuk pada cakupan makna yang lebih luas, maka bisa dijelaskan bahwa kearifan lokal itu pada dasarnya prosesnya akan terstruktur pada keseluruhan warisan budaya. Hal ini bukan hanya pada seni budaya yang terlihat tapi juga yang tidak kasat mata.

Dari segi fungsi, ada berbagai kegunaan kearifan lokal. Salah satunya adalah sebagai sarana atau alat untuk pelestarian sumber daya alam. Selain itu, kearifan lokal juga perwujudan dari etika dan moral, sarana untuk menggambarkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, serta sarana bersosialisasi. (Sedyawati, 2006, p.382).

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan berpikir peneliti yang melatarbelakangi penelitian ini. Adalah sudut pandang pemikiran dan teori yang memberikan arahan dan patokan bagi peneliti untuk dapat memahami serta mendeskripsikan cara kerja tim cek fakta Kompas.com dalam upaya meluruskan berita misinformasi di masa pandemi Covid-19 ini. Utamanya informasi yang erat hubungannya dengan masalah kearifan lokal. Untuk itu, peneliti memilih menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Secara definitif, jurnalistik merupakan proses peliputan, penulisan dan penyebarluasan informasi atau berita melalui media massa. Dalam bentuknya sebagai media online, jurnalisme online merujuk pada proses penyampaian informasi melalui media massa yang terkoneksi internet. Pemeriksaan fakta sebagai proses pembuktian kebenaran dan verifikasi sumber informasi dalam praktik jurnalistik merupakan suatu proses verifikasi yang dilakukan untuk memberikan informasi pada pembaca mengenai kebenaran atas suatu informasi berita. Dalam jurnalistik online, pemeriksaan fakta berarti mengarahkan pembaca pada sumber informasi serupa sebagai pembuktian kebenaran berita.

Kompas.com sebagai pionir media online di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prosedur pemeriksaan fakta, tidak hanya sebagai edukasi bagi para pembacanya tetapi sekaligus membangun budaya baru bagi jurnalisme online. Salah satu jenis cek fakta yang akan diteliti adalah berita atau informasi di media online yang berkaitan dengan masalah pandemi Covid-19 yang kerap dikaitkan dengan masalah berbau mistik, dicampuradukkan dengan kepercayaan berdasarkan kearifan lokal sehingga akhirnya dipercaya sebagai sebuah kebenaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisa bagaimana cara kerja tim cek fakta Kompas.com kontributor dalam upaya meluruskan berita misinformasi yang berkaitan dengan masalah pandemi Covid-19 dengan tujuan agar masyarakat luas mendapat informasi yang tidak menyesatkan. Termasuk di dalamnya informasi yang berkaitan dengan masalah kearifan lokal. Menurut penulis, literasi seperti ini sangat penting dilakukan agar masyarakat luas memperoleh kebenaran yang akurat mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pandemi Covid-19.

Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara para informan yang kompeten di bidangnya dan data sekunder diambil dari kajian Pustaka, jurnal, serta sumber lain dari media online serta media mainstream. Di akhir penelitian, peneliti mengajukan tiga cara pendekatan demi mengantisipasi penyebaran berita bohong, yaitu melalui literasi, teknologi semisal aplikasi cek fakta, serta pendekatan kelembagaan.

